

TANTANGAN *DIGITAL DIPLOMACY* DI INDONESIA

Anna Yulia Hartati

Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email : annayuliahartati@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena digital diplomacy di Indonesia dan tantangannya. Pada era masyarakat terkoneksi internet, informasi menambah pengaruh lebih kuat, karena informasi itu dapat menyebar dalam hitungan detik atau menit. Pemerintah, khususnya lembaga yang mengurus masalah kebijakan luar negeri, seharusnya mengambil manfaat dari keadaan ini karena mereka akan mampu memperluas agenda diplomasi publik mereka dalam cara yang bahkan lebih interaktif. Diplomasi digital, yang juga disebut e-diplomasi, mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi internet dan informasi yang luas untuk membantu aktor dalam diplomasi publik, akses informasi, dan analisis data. Meskipun setiap aktor yang terlibat dalam politik global dapat melakukannya, namun dalam kasus ini, ini terutama mengacu pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menonjolnya gagasan kewarganegaraan digital (digital citizenship), diplomasi tidak hanya berjalan pada satu arah seperti dulu dan negara harus menyesuaikan diri. Penulis menelusuri fenomena ini melalui webnya kemu RI dan dokumentasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *digital diplomacy, kebijakan luar negeri, diplomasi publik*

1. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital bagi sebuah negara, sebab secara geografis umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. (Thontowi, 2009).

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pengguna internet seluruh dunia naik hampir tiga kali lipat, mencapai hampir 3,6 miliar pengguna pada 2017. Banyak yang berpendapat bahwa internet telah menjadi salah satu inovasi yang paling transformatif. Interaksi sosial telah berubah drastis. Masyarakat telah berubah menjadi yang disebut sebagai masyarakat berjejaring (networked society.) Hampir semua orang di dunia terhubung dan informasi mengalir dengan bebas. Dengan keterhubungan semacam itu, informasi didapat, disimpan, diproses, dikelola, dan dibagi dengan cara yang hampir sama sekali berbeda dari cara-cara di masa lalu. Ketika komunikasi antara calon politikus dan pemilih menjadi lebih dekat lewat media sosial, politik juga menjadi lebih digital. Kita melihat ini dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2012, pemilu Prancis 2017, atau kemenangan Donald Trump yang kontroversial.

Dalam politik luar negeri, internet telah membawa “perubahan-perubahan” dalam cara berdiplomasi. Cuitan dari Barack Obama, aktivitas media sosial kedutaan, dan dorongan meluas diplomasi budaya, telah menambah sarana baru untuk diplomasi. Dengan ini, istilah diplomasi digital muncul.

Istilah diplomasi siber dan diplomasi digital telah digunakan berganti-gantian. Namun mereka sebenarnya berbeda. Diplomasi digital merujuk pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama internet dan inovasi berbasis ICT lainnya dalam kegiatan diplomasi. Sementara itu, diplomasi siber merujuk pada strategi untuk menangani berbagai masalah, seperti keamanan, yang muncul dalam ruang siber. Diplomasi digital sering diasosiasikan dengan kegiatan diplomasi publik oleh negara (melalui penggunaan media sosial yang gencar, contohnya). Namun diplomasi digital lebih dari hanya diplomasi

publik. Aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, dan manajemen krisis yang terkait dengan diplomasi.

Contohnya meski mengalami epidemic virus Zika pada 2015 dan 2016, pemerintah Brasil berhasil meyakinkan masyarakat internasional dengan menggunakan media sosial mengenai kesiapan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 dan Piala Dunia. Beberapa pakar kesehatan telah menyarankan Olympiade Rio 2016 ditunda atau dipindah. Namun Brasil cepat mengeluarkan pernyataan di situs web mereka dan akun media sosial dan di situs Olimpiade resmi bahwa mereka mencoba usaha terbaik untuk mengamankan kegiatan tersebut dari virus Zika.

Kegiatan diplomasi sebagai alat kebijakan luar negeri telah mengalami perubahan yang substansial jika diperhatikan perjalanannya pada abad ke-20. Dahulu, diplomasi memiliki interpretasi yang ketat berupa semua bentuk komunikasi antara pemerintah satu negara dan pemerintah lain. Komunikasi langsung antara pemerintah satu negara dan penduduk negara lain dilarang oleh masyarakat internasional dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan.

Peristiwa dunia pada tahun 1920 dan 1930-an kemudian mengubah definisi dan praktik diplomasi, dimulai dengan penggunaan radio sebagai alat komunikasi terhadap komunikan secara massa. Hal ini ditandai oleh dua peristiwa besar: Revolusi Bolshevik 1917 dan kebangkitan Nazi yang berkuasa pada tahun 1933. Penggunaan radio digunakan oleh Nazi dan kaum Bolshevik untuk menyebarkan revolusi di negara-negara tetangga. Selain itu Rusia dan Jerman juga melakukannya dengan berbicara langsung (melalui radio) kepada penduduk negara-negara tetangga sehingga menghindari pemerintah masing-masing. Hal-hal tersebutlah yang menjadi embrio bagi diplomasi publik menggunakan media elektronik.

Apa itu diplomasi publik? Diplomasi publik mengacu pada proses di mana negara-negara berusaha untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka melalui komunikasi dengan publik atau penduduk negara lain.¹ Ini juga merupakan alat untuk menciptakan iklim positif di antara penduduk negara lain untuk memfasilitasi penerimaan kebijakan seseorang. Setelah peristiwa tahun 1920-an dan 1930-an, banyak negara mulai berlatih diplomasi publik. Prancis mengirim atase budaya untuk kedutaan luar negeri, Amerika Serikat mendirikan Voice of America, stasiun radio dan layanan dunia BBC yang mulai mengudara di berbagai bahasa. Dalam konteks Perang Dingin, komunikasi langsung dengan penduduk lawan itu dianggap sama pentingnya dengan ukuran senjata nuklir seseorang.² Namun, berakhirnya abad 20 dan berkembangnya teknologi mengakibatkan munculnya fenomena baru dalam diplomasi publik: diplomasi digital. "Dalam konteks Perang Dingin, komunikasi langsung dengan penduduk lawan itu dianggap sama pentingnya dengan ukuran senjata nuklir seseorang."³

Diplomasi digital termasuk kedalam koridor diplomasi internasional, dapat didefinisikan sebagai peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan platform media sosial dalam melakukan diplomasi publik⁴. Mereka yang mengadopsi definisi ini percaya bahwa media dalam berdiplomasi telah berubah, tapi tidak dengan pesannya. Ketimbang berbicara dengan penduduk negara lain di radio, sekarang para diplomat berkomunikasi melalui timeline Twitter. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa diplomasi digital "lebih dari alat baru dalam kotak alat yang biasa digunakan".

¹Mark Leonard, 2002. *Public Diplomacy*. The Foreign Policy Centre. London, hal 56

²Robert E Quirk, dkk. 2007, Poros Setan. Yogyakarta : PrismaSophie, hal. 27.

³*ibid*

⁴W .Dizrad Jr. (2001). *Digital Diplomacy U.S. foreign policy in the information age*. London: Praeger, hal. 45

Sebagai contoh, kita bisa lihat melalui timeline Twitter-nya, kedutaan Israel telah dapat membangun komunikasi dua arah dengan para pengikutnya. Ketimbang berbicara terhadap penonton melalui TV, diplomat Israel sekarang berkomunikasi dengan penduduk negara lain hanya dengan menanggapi posting-an di profil Facebook dan media sosial lainnya berkaitan dengan isu Palestina. Hal ini membuktikan betapa efektif dan efisiennya diplomasi digital karena memungkinkan terjadinya dialog yang bisa menggantikan monolog diplomasi publik. Komunikasi dua arah seperti ini menawarkan lebih banyak kesempatan untuk keterlibatan dengan penduduk negara lain; keterlibatan yang dapat memfasilitasi terciptanya hubungan antara satu negara dan penduduk negara lain.

Peningkatan fenomena diplomasi digital ini dibuktikan dengan keberadaan 288 akun Facebook, 200 lebih akun Twitter, dan 125 saluran Youtube yang dikelola oleh kementerian luar negeri pada tahun 2012.⁵ Pertanyaannya, apakah diplomasi digital hanya dibatasi oleh penggunaan media sosial? Tentu saja diplomasi digital memiliki spektrum yang lebih kompleks lagi jika kita mengikuti definisi Dizrad (2001) bahwa perkembangan diplomasi digital sejalan dengan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) maka kegiatan diplomasi digital memiliki medium yang lebih dari ranah media sosial. Dapat dikatakan, diplomasi digital adalah kegiatan yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung kegiatan diplomasi.

Di balik efisiensi dan efektivitas penggunaan diplomasi digital, penulis mengemukakan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Penggunaan teknologi seperti telepon, video call, dan surat elektronik antarbejabat negara, selain mengurangi unsur keformalan juga akan mengurangi esensi dari kegiatan diplomasi yang sesungguhnya, yaitu unsur-unsur yang selama ini terdapat dalam diplomasi tradisional berupa nilai-nilai substantif yang hanya bisa dipahami melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, bahkan sikap diam seorang diplomat.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam diplomasi juga memiliki risiko berupa ancaman dari hacker dan cracker terhadap data-data dan informasi negara, karena bagaimanapun juga, tidak ada sistem (digital) yang benar-benar aman. Maka dari itu, seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi yang bersinergi dengan kegiatan diplomasi, segala kementerian yang berkaitan dan para diplomat harus memahami teknologi itu sendiri.

1.2. Tinjauan Pustaka

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Diplomasi digital, yang juga disebut e-diplomasi, mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi internet dan informasi yang luas untuk membantu aktor dalam diplomasi publik, akses informasi, dan analisis data.⁶ Meskipun setiap aktor yang terlibat dalam politik global dapat melakukannya, namun dalam kasus ini, ini terutama mengacu

⁵C. Hayden, (2012). *Social Media at State: Power, Practice and Conceptual Limits for US Public Diplomacy?* *Global Media Journal*, hal. 1-15

⁶Corneliu Bjola dan Marcus Holmes, 2015. *Digital Diplomacy: Theory and Practice*, Routledge, UK, hal 67

pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menonjolnya gagasan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), diplomasi tidak hanya berjalan pada satu arah seperti dulu dan negara harus menyesuaikan diri. Apa yang orang pikirkan dan katakan, pendapat mereka, dalam hal platform digital penting dan dapat benar-benar mempengaruhi dinamika politik global. Oleh karena itu, mengembangkan perangkat digital yang sesuai dengan pengaturan agenda di platform digital menjadi penting. Aparatus digital tidak hanya menyempit ke media sosial, namun terdiri dari pilihan luas untuk meningkatkan nilai strategis secara keseluruhan. Contohnya adalah penggunaan big data dan platform digital untuk konflik simulasi dan gamifikasi skenario konflik.

Pengertian *digital diplomacy*, yang juga dikenal sebagai *eDiplomacy*, sebagaimana diberikan oleh Fergus Hanson, 2012, adalah "the use of the Internet and new information communication technologies to help achieve diplomatic objectives", penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan diplomatik.

Lebih jauh, The UK Foreign and Commonwealth Office mendefinisikan *digital diplomacy* sebagai, "solving foreign policy problems using the internet", mengatasi masalah kebijakan luar negeri dengan memanfaatkan internet. Sementara Kemlu AS memberikan pemaknaan yang lebih bombastis, bahwa *digital diplomacy* sebagai "the term 21st Century Statecraft". Begitu pula The Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development yang memaknainya sebagai "calls it Open Policy".

Wilson Dizard memberikan pandangan yang lebih tajam dalam tulisannya "The Origin of Digital Diplomacy". Ia menyimpulkan ada tiga peran penting yang dimainkan diplomasi di era informasi.

Pertama, memunculkan isu-isu tentang kebijakan luar negeri yang melibatkan sumber informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi canggih. Pengaruh perkembangan dan peningkatan persebaran alat informasi elektronik di Amerika secara tidak langsung memunculkan kebijakan baru yang kemudian dilibatkan dalam pembahasan. Selain itu teknologi ini juga secara tidak langsung mengambil peran dalam merubah kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Kedua, berbagai perubahan dalam pengaturan sumber informasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan biro-biro terkait kebijakan luar negeri lainnya. Ketiga, lonjakan perananan diplomasi publik khususnya yang menggunakan teknologi digital dalam mempengaruhi opini publik. Program diplomasi publik Amerika melalui Voice of America (VoA) berhasil meraih kesuksesan dalam konteks pengembangan informasi, mulai dari internet hingga broadcasting melalui satelit. Program yang sejalan dan setujuan dengan arah kebijakan politik luar negeri AS ini sudah barang tentu merupakan pekerjaan dan tanggung jawab sebuah badan khusus yang ditugaskan untuk itu. Dizard menambahkan pula, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengukur pengaruh kebijakan luar negeri terhadap perkembangan teknologi informasi, yaitu kebijakan, pengoperasian dan diplomasi publik.

Lebih jauh, dengan kedatangan diplomasi 3.0, mengkonsolidasikan generasi digital diplomat masa depan dengan strategi diplomasi baru juga menjadi perhatian. Salah satu isu penting yang muncul dengan era digital adalah masalah keamanan. Selama berabad-abad praksis diplomasi, keamanan selalu menjadi isu sentral. Secara harfiah, dari Thucydides to Trump telah membahas hal ini. Perubahan apa yang sekarang ancaman keamanan bisa terwujud melalui siber, bentuk pendek dari istilah "sibernetika" yang berarti integrasi antara manusia dan teknologi atau sebagaimana Norbert Wiener, seorang ahli matematika Amerika dan ahli sibernetika, mendeskripsikan "...studi ilmiah tentang pengendalian dan komunikasi pada hewan dan mesin."

Dengan definisi yang disebutkan di atas, yang muncul dalam imajinasi Anda mungkin gambaran dari Arnold Schwarzenegger dalam film *The Terminator*. Meskipun sangat mungkin dan itu bisa menjadi masa depan kita, Anda harus menahan pemikiran itu. Sering kali, ini banyak dikaitkan dengan ancaman keamanan, meski jelas tidak terbatas pada daerah itu. Meskipun ditelusuri jauh sebelum itu, satu isu mengenai keamanan maya adalah fenomena whistleblowing, terutama kasus Edward Snowden. Baru-baru ini, isu yang menonjol adalah kasus 2016 dibobolnya kampanye presiden Amerika Serikat.

Diplomasi siber muncul untuk menanggapi isu-isu ini. Orang menggunakan "siber" sebagai istilah longgar untuk menganggap makna mengendalikan atau mengatur melalui teknologi. Dengan demikian, ini mempengaruhi praktik diplomasi siber karena dipahami sebagai penggunaan alat, etos, dan sikap diplomatik untuk menguraikan hal-hal yang timbul di dunia maya. Kasus diplomasi siber paling tepat digambarkan oleh dialog siber dan kemitraan yang sedang berlangsung antara Perancis dan Amerika Serikat dalam kemananan dunia maya dan kebijakan cyber.

Di luar masalah keamanan tradisional, era digital hadir dengan banyak kesempatan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi digital dimana perusahaan dan para startup teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Anda bermain musik menggunakan Spotify, menonton serial melalui Netflix, melihat update terbaru di Reddit, dan ketika Anda tinggal di Asia Tenggara, Anda mungkin memesan tiket pesawat dan hotel untuk liburan menggunakan Traveloka. Perusahaan-perusahaan ini menjadi pusat kekuatan global dan menjadi lebih dan lebih independen dari negara bagian. Parag Khanna, ahli strategi global yang berbasis di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, berpendapat bahwa saat ini kita akan memasuki era metanasional dimana perusahaan "secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan."

Dengan ini, techplomacy hadir sebagai tindakan diplomasi mutakhir. Denmark adalah pengadopsi pertama praktik diplomatik ini. Kantor Duta Teknologi Denmark mendefinisikan techplomacy sebagai "... pengakuan akan peran kunci yang dimainkan oleh teknologi dan digitalisasi dan akan semakin banyak dimainkan di masa depan bagi individu dan masyarakat. Ini juga merupakan pengakuan atas pengaruh politik dan global yang dimiliki industri teknologi pada abad ke-21".

Sementara techplomacy dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan industri teknologi, dirancang untuk sejalan dengan diplomasi tradisional. Menurut Casper Klynge, Duta Besar Teknisi Denmark, seorang techplomat perlu membangun jaringan dan mendiskusikan pandangan dan kebijakan, mendorong investasi, dan mempromosikan ekspor ke startup Silicon Valley, termasuk isu siber, dan kebijakan pengembangan.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada pelaksanaan diplomasi. Berbagai macam perilaku diplomasi muncul seiring datangnya era digital. Meski sering digunakan secara bergantian, diplomasi digital berbeda dengan diplomasi siber. Diplomasi digital berkaitan dengan platform komunikasi mengenai bagaimana diplomasi dijalankan, sementara diplomasi siber mengacu pada aspek strategis bagaimana melakukan diplomasi di era digital dalam merespons pembangunan yang menyertainya. Demikian pula, techplomacy, di sisi lain, menandakan jenis diplomasi baru yang tidak hanya berpusat di seputar aktor negara, tapi juga perusahaan swastadengan demikian mengakui gagasan kekuasaan yang meluas dari negara ke aktor non-negara, terutama perusahaan teknologi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Indonesia dan diplomasi digital

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan mengambil kasus tunggal di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif.

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang semakin banyak menggunakan teknologi digital dalam diplomasi internasional. Menurut sebuah survei, Indonesia menempati posisi ke-38 dari 209 negara di *Digital Diplomacy Review 2017*. Peringkat ini menurun dibanding peringkat tahun lalu, ketika Indonesia menempati satu posisi lebih tinggi. Indonesia berada di belakang negara-negara Eropa yang memiliki teknologi tinggi seperti Prancis dan Inggris, dan juga negara-negara Asia seperti Jepang dan India. Namun, Indonesia berada di depan negara-negara Asia. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada Center for Digital Society menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 di antara 203 negara untuk kegiatan diplomasi digital.

Studi ini memperhitungkan jumlah besar pengguna internet di Indonesia; 132,7 juta pada 2016 menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ini artinya Indonesia memiliki 51% tingkat penetrasi internet dari populasi 260 juta. Bayangkan bagaimana bagusnya negara ini akan menyelesaikan masalah ketika seluruh penduduk Indonesia berjejaring internet. Sebuah masyarakat terkoneksi di era digital akan lebih transparan karena individu dapat mudah membagikan informasi secara online.

Hal ini mempengaruhi aktifitas diplomasi juga. Diplomasi tidak hanya berurusan dengan sebuah “jaringan” berbagai negara dan aktor-aktor non-negara lagi. Digital diplomasi ini akan memperkenalkan rutinitas baru seperti menggelar dialog online, juga mengambil masukan online dari publik dalam proses pembuatan kebijakan. Kini, para diplomat atau para pemimpin negara juga menggunakan platform online dalam format media sosial untuk berkomunikasi satu sama lain. Satu studi tentang penggunaan Twitter untuk komunikasi diplomatik informal selama negosiasi nuklir P5+1 (2013-2015) menunjukkan bahwa komunikasi via Twitter antara Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif efektif untuk memperkuat kesepakatan.

Pada era masyarakat terkoneksi internet, informasi menambah pengaruh lebih kuat, karena informasi itu dapat menyebar dalam hitungan detik atau menit. Pemerintah, khususnya lembaga yang mengurus masalah kebijakan luar negeri, seharusnya mengambil manfaat dari keadaan ini karena mereka akan mampu memperluas agenda diplomasi publik mereka dalam cara yang bahkan lebih interaktif. Dalam lingkungan diplomasi digital yang ideal, pemerintah dapat memperjelas pesan mereka, termasuk agenda kebijakan luar negeri, dan publik dapat memiliki saluran yang lebih cepat untuk terhubung dengan pemerintah mereka. Indonesia belum memiliki agenda yang jelas atau cetak biru dalam menggunakan diplomasi digital. Untuk merumuskan sebuah agenda digital diplomasi yang lebih komprehensif, rumusnya dapat diambil dari negara-negara yang memiliki agenda yang jelas dan mempraktikkan diplomasi digital seperti Inggris dan Swedia.

Inggris telah membuat sebuah Unit Transformasi Digital, yang ditugaskan khusus untuk pengelolaan layanan digital negara itu, termasuk juga strategi diplomasi digital mereka. Pemerintah Swedia juga menggunakan media sosial secara luas melalui kedutaan

mereka di luar negeri. Mereka juga mempublikasikan tabloid online terbaru secara reguler yang disebut Swedish Foreign Policy News sebagai cara untuk memperkuat sudut pandang kebijakan keluar negeri mereka.

Seperti dikatakan sebelumnya, di era Yunani kuno, negara berkomunikasi melalui pemberita. Di era pemerintahan Inggris, para diplomat juga bersurat satu sama lain juga, seperti dengan pasangan terkenal selama periode tersebut - John Keats dan Fanny Brawne (sebelum Anda bertanya, ya, itu adalah penyair John Keats). Sementara itu, radio mendominasi seluruh era Perang Dunia II. Kemudian, efek CNN memberikan efek yang luas, terutama dalam kasus krisis rudal Kuba saat sihir TV benar-benar dapat mencegah perang. Saya merevisi itu; sihir TV dan perkataan John F. Kennedy yang mencegahnya.

Ketika komputer pribadi menjadi mainstream di tahun 1980an, orang tidak lagi mengetik dengan mesin tik mereka, malah mereka akan menggunakan email. Sejak saat itu, teknologi informasi telah berkembang, menandai dimulainya era baru yang disebut era digital. Dampak hal tersebut sangat besar sehingga mengubah cara diplomasi dilakukan. Seiring dengan itu, istilah diplomasi digital muncul.

2.2. Penggunaan Medsos dalam mendukung Pelaksanaan Digital diplomacy

Praktik diplomasi secara tradisional dijalankan melalui komunikasi yang terkontrol dari, dan antara, badan-badan dan lembaga internasional, kedutaan, dan pemerintah. Tren di era kini, dengan akses yang lebih baik terhadap internet dan teknologi digital, diplomasi kini juga telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Berbagai platform media sosial di Indonesia sangat beragam, sebut saja Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Hampir semua orang memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi dan hiburan. Namun, media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh para diplomat sebagai sarana penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara real time. Selain itu, kecepatan teknologi digital juga sangat membantu kerja para diplomat dalam menyampaikan laporan atau menyelesaikan persoalan yang memerlukan keputusan cepat.

Agar penyebaran informasi tepat sasaran, pemilihan platform media sosial menjadi sangat penting karena setiap media sosial menawarkan manfaat yang berbeda – beda. Sebagai contoh, twitter merupakan sarana yang tepat untuk mensosialisasikan capaian diplomasi Indonesia melalui pesan singkat yang terdiri dari 140 karakter. Adapun facebook dapat digunakan untuk membuat grup yang sesuai dengan minat para anggotanya, misalnya grup alumni hubungan internasional atau hukum internasional yang dapat digunakan sebagai sarana berdialog mengenai diplomasi atau politik luar negeri.

Partisipasi masyarakat juga sangat esensial dalam media sosial. Oleh karena itu, agar masyarakat membantu penyebaran informasi secara viral, menyusun konten secara menarik yang dilengkapi dengan pertanyaan atau polling sehingga komunikasi dua arah dapat terjalin dengan baik.

2.3. Tantangan Kemlu

Melihat kesiapan negara-negara Barat dalam menghadapi era diplomasi digital, negara-negara seperti Amerika, Australia dan Kanada telah membangun infrastruktur jauh-jauh hari. Amerika Serikat yang merupakan negara pioner penerapan diplomasi digital dalam politik luar negerinya, pada tahun 2002, membangun satuan tugas di lingkungan Kemlu yang khusus menangani eDiplomacy.

Sejak itu, pembangunan opini untuk mendukung misi luar negeri Paman Sam melalui internet dan televisi berlangsung secara massif. Sentimen negatif serangan AS ke

Irak dan Afghanistan pada awal 2000-anything meremukkan citra mereka di dunia hanya berlangsung singkat. Berita-berita negatif dan merugikan bisa diredam. Melalui CNN, VoA maupun internet, AS menyusun propaganda terstruktur dan rapi, hingga publik dunia memahami bahwa serangan AS ke kawasan tersebut dilakukan untuk memerangi terorisme, membasmi senjata pemusnah massal dan menyuburkan demokrasi.

Indonesia sendiri dalam diplomasi di kawasan tak pernah lepas dari 'serangan' digital diplomacy, khususnya dari negara-negara tetangga. Seperti yang terjadi tahun 2015 lalu, Australia melancarkan diplomasi digital untuk menyelamatkan warga negaranya — dikenal sebagai komplotan Bali Nine — yang akan dieksekusi akibat kasus narkoba.

Setelah berbagai jurus lobi resmi yang melibatkan pemerintahan kedua negara untuk menyelamatkan Bali Nine gagal, pemerintah Australia akhirnya menggunakan diplomasi elektronik melalui media. Diantaranya, pemerintah dan warga Australia mengancam akan memboikot pariwisata di Bali jika eksekusi mati tetap dilakukan. Menlu Julia Bishop dan Senator Independen Jacqui Lambie mengancam akan memberhentikan bantuan internasional kepada Indonesia jika kita tetap mengeksekusi warganya tersebut.

Bertolak dari pengalaman Indonesia dalam bersentuhan langsung dengan digital diplomacy dalam skala yang beragam, apakah saat ini kita juga siap memaksimalkan instrumen baru tersebut untuk mendukung politik bebas aktif kita? Penulis melihat kita sudah melakukannya, namun masih dalam skala yang terbatas. Barangkali hal ini karena start kita mengadopsi diplomasi digital relatif terlambat. Hal ini setidaknya terlihat dari Diklat Diplomati Senior (Sesparlu) Kemlu, 29 September 2015 yang baru membahas diplomasi varian baru dalam Digital Diplomacy Week.

Dengan berbagai tantangan dan ancaman yang kita hadapi sekarang ini, seyogyanya Kemlu sudah mengoperasikan digital diplomacy enam atau tujuh tahun lalu. Meskipun saat ini Kemlu mulai menjalankan diplomasi digital namun perspektif yang digunakan dalam masih terkesan business as usual. Dengan kata lain, Kemlu memainkan diplomasi digital dengan background polugri (politik luar negeri-red) yang normal. Keinginan untuk membangun fasilitas digital berikut penyiapan SDM yang akan berperang di alam maya dalam konteks counter opini dan penciptaan opini belum terlihat.

Tantangan yang kita hadapi saat ini terkait ancaman dari dunia jauh lebih kompleks dibanding lima tahun lalu. Setidaknya ada dua ancaman nyata yang merongrong kedaulatan negara di depan mata.

Pertama, arus deras kampanye Papua Merdeka di dunia maya. Meski saat ini Presiden Joko Widodo berupaya membangun Papua dengan jargon "Papua Tanah Damai" — dan itu beliau tunjukkan dengan berkali-kali berkunjung kesana — namun manuver aktivis-aktivis Papua Merdeka, khususnya yang tergabung dalam The United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) di luar negeri melalui sosmed dan jaringan digital lainnya terus meningkat. Portal dan website yang mendeskreditkan Pemerintah terus bermunculan. Isinya tak lain dari bully terhadap Pemerintah Indonesia dan pemutarbalikan fakta. Langkah yang diambil ULMWP ini benar dan tepat dalam konteks kepentingan mereka untuk menciptakan opini, Indonesia tengah menjajah mereka. Penulis mengatakan strategi ULMWP dalam membangun opini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (digital) sudah benar dan tepat. Strategi ini paling tidak sudah membuahkan hasil. Sebagian negara-negara Pasifik Selatan kini berani memberikan dukungan atas misi Papua Merdeka, baik yang secara terang-terangan maupun yang implisit. Vanuatu misalnya, menyatakan secara resmi mendukung kemerdekaan Papua. Kepulauan Solomon, setelah PM Gordon Darcy yang pro-Indonesia mengalami kekalahan, PM pengganti Darcy secara implisit mendukung OPM. Itu terlihat dari dibentuknya organisasi Solomon Islands for West Papua

(SIFWP). Hal serupa terjadi di Fiji, yang meskipun dalam diplomasi *above the line* akrab dengan Jakarta, namun tahun lalu kelompok masyarakat di sana meluncurkan Fiji Solidarity Movement for West Papua Freedom. Terakhir, di luar perkiraan, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu mengunjungi Port Moresby, Papua Nugini (PNG), saat ini indikasi dukungan pemerintahan PNG ke OPM mulai terlihat. Semakin meningkatnya jumlah warga dunia dan negara yang bersimpati dengan perjuangan ULMWP, berarti penggalangan opini yang mereka bangun melalui sosial media telah mendatangkan hasil.

Kedua, ancaman terorisme yang kini makin meningkat skalanya pasca serangan di Jalan MH Thamrin, Januari 2016. Disinyalir para *suicide bombers* adalah teroris generasi baru yang melek teknologi, khususnya internet. Mereka belajar doktrin radikal hingga cara membuat bom dari internet. Demikian bebas dan tanpa batas informasi di internet membuat pemerintah perlu melakukan aksi nyata untuk menyaring situs-situs radikal yang berpotensi membahayakan anak bangsa.

Dalam kaitan diplomasi digital, ke depan perlu upaya serius untuk melihat diplomasi ini tidak hanya dari perpektif hubungan bilateral, kerjasama budaya dan ekonomi semata. Sebaliknya kita harus berani melihatnya dari kaca mata potensi krisis. Dengan akan dibentuknya Badan Cyber Nasional (BCN), instrumen digital diplomacy tidak hanya merupakan pilihan, melainkan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengawal kepentingan nasional kita dalam bingkai politik luar negeri bebas aktif.

Di luar itu, generasi muda kita yang sangat akrab dengan teknologi informasi, harus mampu kita kapitalisasi menjadi tentara siber (*cyber army*) nasional yang menakutkan bagi siapapun yang ingin memperburuk citra Indonesia. Energi mereka selama ini akan lebih baik dan bermanfaat apabila disalurkan untuk berperang melawan musuh-musuh negara, dibanding saling *caci-maki* sesama anak bangsa yang tak berkesudahan seperti selama ini. Jika Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempunyai rencana besar untuk melatih anak bangsa yang terpanggil untuk membela negara melalui kegiatan latihan fisik dan disiplin ala militer, Kemlu bisa memanfaatkan anak-anak muda dari generasi X dan Y yang sangat menguasai IT dan aktif di sosial media menjadi tentara siber yang tangkas dalam *counter* isu dan propaganda yang dikembangkan oleh negara-negara asing.

3. KESIMPULAN

Meskipun pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mengelola disrupsi digital seperti pornografi di internet dan berambisi mempersempit kesenjangan digital, diplomasi digital belum bergaung di publik. Yang mungkin paling bisa dikatakan sebagai agenda diplomasi digital oleh pemerintah Indonesia adalah ketika Kementerian Luar Negeri menggelar sebuah pertemuan para pakar tentang diplomasi digital Mei tahun 2017. Pertemuan itu memutuskan bahwa diplomasi digital akan digunakan untuk beberapa agenda penting negara ini. Contohnya, diplomasi digital dapat digunakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, juga dapat digunakan untuk mempromosikan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah kita.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini sedang mempersiapkan sebuah draf dokumen master plan untuk diplomasi digital. Dari sini, kita dapat cukup berharap sebuah strategi konkret dalam diplomasi digital dari negara ini dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat belajar banyak dari beberapa negara seperti Inggris dan Swedia dalam memperkenalkan rumusan agenda diplomasi digital dari adaptasi institusional ke pendekatan baru dalam sosialisasi kebijakan luar negeri melalui media baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjola, Corneliu dan Marcus Holmes, 2015. *Digital Diplomacy: Theory and Practice*, Routledge, UK
- C.Hayden, (2012). *Social Media at State: Power, Practice and Conceptual Limits for US Public Diplomacy?* *Global Media Journal*
- Cull, N. J. (2008). *Public diplomacy: Taxonomies and histories*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1)
- Hayden, C. (2012). *Social Media at State: Power, Practice and Conceptual Limits for US Public Diplomacy?* *Global Media Journal*
- Leonard, Mark, 2002. *Public Diplomacy*. The Foreign Policy Centre. London
- Metzger, E. T. (2012). *Is it the medium or the message? Social media, American public relations & Iran*. *Global Media Journal*. Quirk, Robert E, dkk. 2007, *Poros Setan*. Yogyakarta : Prismsophie
- Roberts, W. R. (2007). *What is public diplomacy? Past practices, present conduct, possible future*. *Mediterranean Quarterly*, 18(4)
- Shenhav, S. R., Sheaffer, T., & Gabay, I. (2010). *Incoherent narrator: Israeli public diplomacy during the disengagement and the elections in the Palestinian Authority*. *Israel Studies*, 15(3)
- W . Dizrad Jr. (2001). *Digital Diplomacy U.S. foreign policy in the information age*. London: Praeger
- <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/KEMLU-RI-Lebih-Jauh-Tentang-Tantangan-dan-Peluang-Media-Sosial-Dalam-Diplomasi-Digital.aspx>, Diakses tanggal 18 Juli 2018